

## **KATA PENGANTAR**

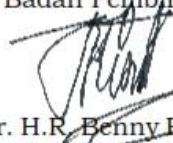
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perencanaan Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang penting dan strategis untuk skala prioritas program pembentukan undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya.

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas jangka menengah dan tahunan. Prolegnas merupakan skala prioritas pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Pemerintah bersama Badan Legislasi DPR dan DPD telah menyepakati Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2019 dan Program Legislasi Nasional Perubahan RUU Tahun 2015-2019 yang tertuang dalam Keputusan DPR Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019.

Selain itu, perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Presiden. Pemerintah telah menetapkan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019.

Kementerian Hukum dan HAM selaku koordinator penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Program Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa dukungan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Semoga kompilasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019, dan Program Legislasi Nasional Perubahan Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019, serta Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019 ini dapat membantu serta menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.

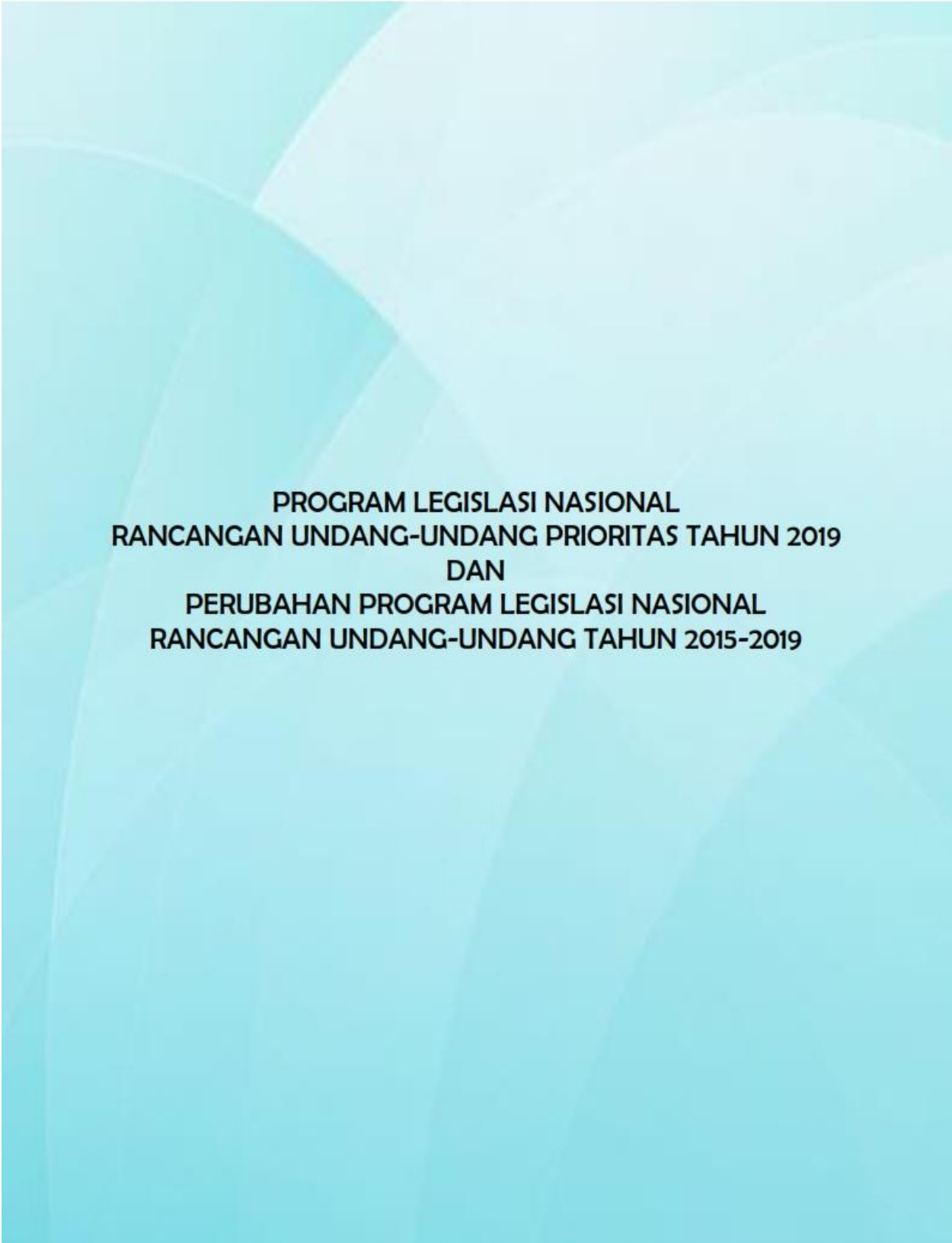
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N  
NIP. 19620410 198703 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
<b>Program Legislasi Nasional</b> .....	1
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019.....	2
Lampiran I Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019.....	5
Lampiran II Daftar Perubahan Prolegnas RUU Tahun 2015-2019..	10
<b>Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019</b> .....	21
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019.....	22
Lampiran Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019.....	24
Rancangan Peraturan Pemerintah dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2018 yang Dilanjutkan Penyusunannya Pada Tahun 2019.....	43
<b>Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019</b> .....	50
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.....	51
Lampiran Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.....	53
Rancangan Peraturan Presiden dalam Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2018 yang Dilanjutkan Penyusunannya Pada Tahun 2019.....	68
<b>Monitoring Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2019, Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019, dan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019</b> .....	75
Target Penyusunan RUU Tahun 2019.....	76
Target Penyusunan RPP dan RPerpres Usulan Baru Tahun 2019.....	77
Target Penyusunan RPP dan RPerpres Luncuran Tahun 2018.....	77



**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019  
DAN  
PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 19 /DPR RI/I/2018-2019**

**TENTANG  
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* Pasal 65 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 *juncto* Pasal 40 ayat (5) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019;
  - b. bahwa Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6A/DPR RI/II/2014-2015;
  - c. bahwa Keputusan Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 29 Oktober 2018 telah menyepakati Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 untuk ditetapkan;



d. bahwa penetapan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
  3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;
  4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1361);

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke-7 tanggal 31 Oktober 2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019 DAN PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015-2019.**

**PERTAMA** : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI;
6. Para Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Para Ketua Fraksi : FPD Perjuangan, FPG, FPD, FPKS, FPAN, FPPP, FPKB, F-PGERINDRA, FPN Demokrat dan F-PHANURA;
8. Kepala Badan Keahlian DPR RI;
9. Para Deputi dan Inspektorat Utama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI;
10. Para Kepala Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 31 Oktober 2018

**KETUA,**

  
**H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.**

LAMPIRAN I      KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR     : 19/DPR RI/1/2018-2019  
 TANGGAL  : 31 OKTOBER 2018

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
 RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2019**

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pertanahan.	DPR/KOMISI II	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
2.	RUU tentang Jabatan Hakim.	DPR/KOMISI III	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
3.	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
4.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	DPR/KOMISI VI	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
5.	RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	DPR/KOMISI VIII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
6.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
8.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
9.	RUU tentang Pertembakuan	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
10.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
11.	RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekam, dan Karya Elektronik	DPR/KOMISI X	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
12.	RUU tentang Kebidanan	DPR/KOMISI IX	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
13.	RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
14.	RUU tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	DPR/KOMISI IV	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
15.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR/KOMISI VII	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
17.	RUU tentang Sumber Daya Air	DPR/KOMISI V	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
18.	RUU tentang Konsultan Pajak	DPR/ANGGOTA	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
19.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
20.	RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
21.	RUU tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
22.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018



No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
23.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
24.	RUU tentang Bea Meterai	PEMERINTAH	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
25.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
26.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
27.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Pembahasan Tingkat I	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
28.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/KOMISI VI	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
29.	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR/ANGGOTA	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
30.	RUU tentang Pekerjaan Sosial	DPR/KOMISI VIII	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
31.	RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan	DPR/ANGGOTA	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
32.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
33.	RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
35.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	(Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
36.	RUU tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
37.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Menunggu Surat Presiden (Surpres)	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
38.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	DPR/KOMISI VII	Menunggu Paripurna Penetapan menjadi RUU Inisiatif DPR	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
39.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR/KOMISI I	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
40.	RUU tentang Perkelapasawitan.	DPR/ANGGOTA	Proses Harmonisasi	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
41.	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
42.	RUU tentang Penyadapan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
43.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR/KOMISI IX	Penyusunan	Luncuran Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018
44.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/KOMISI V	Penyusunan	RUU Usulan Baru
45.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPRKOMISI VII	Penyusunan	RUU Usulan Baru
46.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
47.	RUU tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/BADAN LEGISLASI	Penyusunan	RUU Usulan Baru
48.	RUU tentang Permusikan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	TAHAPAN	KETERANGAN
49.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
50.	RUU tentang Perubahan kedua atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR/ANGGOTA	Penyusunan	RUU Usulan Baru
51.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
52.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
53.	RUU tentang Data Pribadi	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
54.	RUU tentang Wabah	PEMERINTAH	Penyusunan	RUU Usulan Baru
55.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Penyusunan	RUU Usulan Baru

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	RUU Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota
5.	RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan/Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA  
NOMOR : 19/DPR RI/I/2018-2019  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2018

**DAFTAR PERUBAHAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANGAN TAHUN 2015-2019**

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR/PEMERINTAH	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	DPR/PEMERINTAH	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 19 Tahun 2016
4.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR	
5.	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/PEMERINTAH	
6.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR/PEMERINTAH	
7.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
8.	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia	DPR	
9.	RUU tentang Konvergensi Telematika	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
10.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara	PEMERINTAH	
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	PEMERINTAH	
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR	
13.	RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi	PEMERINTAH	
14.	RUU tentang Wawasan Nusantara	DPD	
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos	PEMERINTAH	
16.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	PEMERINTAH	
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	PEMERINTAH	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 8 Tahun 2015

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
19.	RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2015
20.	RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 7 Tahun 2017
21.	RUU tentang Pertanahan	DPR	
22.	RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 2 Tahun 2018
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara	DPR/DPD	
25.	RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	DPR/PEMERINTAH	
26.	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur	DPD	
27.	RUU tentang Provinsi Bali	DPD	
28.	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan	DPR	
29.	RUU tentang Partisipasi Masyarakat	DPD	
30.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	
31.	RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria	DPR	
32.	RUU tentang Perkumpulan	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
33.	RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH	
34.	RUU tentang Hukum Acara Pidana	DPR	
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	DPR/PEMERINTAH	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	PEMERINTAH/DPD	
37.	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/PEMERINTAH	
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR	



No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
39.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR	
41.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	
42.	RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat	DPR/DPD	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 5 Tahun 2018
44.	RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana	PEMERINTAH	
45.	RUU tentang Mahkamah Agung	DPR	
46.	RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 20 Tahun 2016
47.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	
48.	RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi)	PEMERINTAH	
49.	RUU tentang Paten	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 13 Tahun 2016
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	PEMERINTAH	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR	
52.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	
53.	RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer	PEMERINTAH	
54.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	PEMERINTAH	
55.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
57.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	
58.	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	PEMERINTAH	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI	DPR	
60.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	
61.	RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court)	DPR	
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR	
64.	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya	DPR	
66.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
67.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia	PEMERINTAH	
68.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/PEMERINTAH	
69.	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 7 Tahun 2016
70.	RUU tentang Zona Tambahan Indonesia	PEMERINTAH	
71.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR	
72.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR	
74.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan	DPR	
75.	RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan)	DPR	
76.	RUU tentang Jalan	DPR	
77.	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat	DPR	
78.	RUU tentang Jasa Konstruksi	DPR	
79.	RUU tentang Arsitek	DPR	
80.	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR	
81.	RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan	DPR	
82.	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR	
83.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN	DPR	
84.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR/ DPD	
85.	RUU tentang Perkoperasian	PEMERINTAH	
86.	RUU tentang Pertembakauan	DPR	
87.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR	
88.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
89.	RUU tentang Bahan Kimia	PEMERINTAH	
90.	RUU tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
91.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPD	
92.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
93.	RUU tentang Ekonomi Kreatif	DPD	
94.	RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR	
95.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR	
96.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR	
97.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan	PEMERINTAH	
98.	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR	
99.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
100.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR	
101.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR	
102.	RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
103.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
104.	RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji dan Penyelenggaraan Umrah	DPR	
105.	RUU tentang Penyandang Disabilitas	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 8 Tahun 2016
106.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR/ DPD	
107.	RUU tentang Kepalaingmerahan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 1 Tahun 2018
108.	RUU tentang Praktik Pekerjaan Sosial	DPR	
109.	RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren	DPR	
110.	RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR	
111.	RUU tentang Perlindungan Umat Beragama	DPR/ PEMERINTAH	



No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
112.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	PEMERINTAH	
113.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 18 Tahun 2017
114.	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR	
115.	RUU tentang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR/ DPD	
116.	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
117.	RUU tentang Kebidanan	DPR	
118.	RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 6 Tahun 2018
119.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	DPR	
120.	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR	
121.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR	
122.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	PEMERINTAH	
123.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH	
124.	RUU tentang Pengawasan Ketenagakerjaan	DPR/PEMERINTAH	
125.	RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/PEMERINTAH	
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/PEMERINTAH/ DPD	
127.	RUU tentang Pemajuan Kebudayaan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 5 Tahun 2017
128.	RUU tentang Bahasa dan Kesenian Daerah	DPD	




No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
129.	RUU tentang Sistem Perbukuan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 3 Tahun 2017
130.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	DPR	
132.	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan	DPR/PEMERINTAH/DPD	
133.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	DPR/PEMERINTAH	
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/PEMERINTAH	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2018
136.	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah	DPR/PEMERINTAH	
137.	RUU tentang Pencegahandan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 9 Tahun 2016
138.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	
139.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR	
140.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal	PEMERINTAH	
141.	RUU tentang Pajak Penghasilan	PEMERINTAH/DPD	
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	PEMERINTAH/DPD	
143.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara	PEMERINTAH/DPD	
144.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
145.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	PEMERINTAH	
147.	RUU tentang Lelang	PEMERINTAH	
148.	RUU tentang Penjaminan	DPR	Sudah disahkan menjadi UU: 1 Tahun 2016
149.	RUU tentang Penjaminan Polis	PEMERINTAH	
150.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	PEMERINTAH	
151.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
152.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPD	
153.	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR/DPD	
154.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	PEMERINTAH	
155.	RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia	PEMERINTAH	
156.	RUU tentang Bea Materai	PEMERINTAH	
157.	RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan	PEMERINTAH	
158.	RUU tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	PEMERINTAH	
159.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPR	
160.	RUU tentang Tabungan Haji	DPR	
161.	RUU tentang Pengampunan Pajak	PEMERINTAH	Sudah disahkan menjadi UU: 11 Tahun 2016
162.	RUU tentang Perkelapasawitan	DPR	
163.	RUU tentang Kedaulatan Sandang Nasional/RUU tentang Pertekstilan	DPR	
164.	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	PEMERINTAH	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
165.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Keamanan Laut	DPR	
167.	RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual	DPR	
168.	RUU tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah	DPR	
169.	RUU tentang Perubahan atas UU No 21 Th 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR	
170.	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
171.	RUU Tentang Konsultan Pajak	DPR	
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.	DPR	
173.	RUU tentang Ketenaganukliran.	PEMERINTAH	
174.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	PEMERINTAH	
175.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	DPD	
176.	RUU Tentang Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara.	DPD	
177.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.	DPR	
178.	RUU tentang Sanitasi.	DPR	
179.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.	DPR	
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	DPR	

No	JUDUL RUU	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.	DPR	
182.	RUU tentang Sistem Pelaporan, Pendaftaran, Pemeriksaan dan Penentuan Status Hukum Gratifikasi dan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.	DPR	
183.	RUU tentang Permusikan	DPR	
184.	RUU tentang Hak atas Tanah Adat	DPD	
185.	RUU tentang Penyadapan	DPR	
186.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR	
187.	RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan	DPR	
188.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR	
189.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	PEMERINTAH	



**PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN PEMERINTAH  
TAHUN 2019**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523+);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN.

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2019.

KESATU ...

SK No 002505 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



*[Signature]*  
Silvanna Djaman

SK No 002522 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2019

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPP tentang Perizinan dan Pelaporan Bahan Kimia Daftar dan Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar	Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia	1. Jenis-jenis bahan kimia 2. Mekanisme produksi, penggunaan, dan transfer Bahan Kimia Daftar 3. Mekanisme produksi Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar 4. Pelaporan atas produksi, penggunaan, importasi, eksportasi Bahan Kimia Daftar 5. Pelaporan atas produksi Bahan Kimia Organik Diskret Nondaftar 6. Pengawasan 7. Sanksi	Kementerian Perindustrian

SK No 001556 C

2. RPP . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan atas UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	Pasal 10 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 48 ayat (6), dan Pasal 60 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan	1. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk 2. Penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah 3. Penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat 4. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi nakhoda, kapten penerbang, dan pengemudi atau penanggung jawab kendaraan darat 5. Pejabat karantina kesehatan	Kementerian Kesehatan
3.	RPP tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa	1. Pasal 151 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Pasal 9, Pasal 16, Pasal 24, Pasal 32, dan Pasal 59 UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	1. Penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif 2. Sumber daya dalam upaya kesehatan jiwa 3. Pengawasan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat	Kementerian Kesehatan

SK No 001502 C

4. RPP . . .



- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
4.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua	Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), pasal 24 ayat (2), dan pasal 25 ayat (3) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua	1. Pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Majelis Rakyat Papua dalam penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat 2. Peran Majelis Rakyat Papua dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kementerian Dalam Negeri
5.	RPP tentang Perlindungan Khusus Anak	Pasal 71C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	1. Perlindungan khusus diberikan dalam bentuk rehabilitasi secara fisik, psikis, sosial, dan pendampingan psikososial 2. Pengaturan tentang langkah pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

6. RPP . . .

SK No 001503 C





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Pasal 52 UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	1. Jenis pekan dan kejuaraan olahraga 2. Pekan olahraga 3. Pekan Olahraga Nasional 4. Pekan olahraga penyandang disabilitas 5. Kejuaraan olahraga 6. Pendanaan	Kementerian Pemuda dan Olahraga
7.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru	Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	1. Tunjangan profesi diberikan kepada guru dan guru yang mendapat tugas tambahan 2. Guru yang diangkat sebagai kepala satuan pendidikan akan mendapatkan tunjangan kepala satuan pendidikan 3. Kepala satuan pendidikan yang diangkat sebagai pengawas sekolah akan mendapatkan tunjangan pengawas sekolah 4. Pemberian maslahat tambahan bagi guru	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SK No 001504 C

8. RPP . . .



- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	RPP tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan	Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 59 ayat (3), Pasal 60 ayat (4), dan Pasal 61 ayat (4) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	1. Mengatur mengenai kualifikasi dan kompetensi minimum persyaratan Kepala TK/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK dan Pengawas Sekolah 2. Standar Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas Sekolah dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi 3. Mengatur tentang penilik satuan pendidikan pada pendidikan nonformal	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	RPP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 42 UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	1. Tata cara penerbitan lisensi 2. Tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenalkan sanksi administratif	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10.	RPP tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pasal 20, pasal 23, Pasal 28, Pasal 36, Pasal 38 ayat (4), Pasal 43, Pasal 52 ayat (2),	1. Tata cara pemberian perlindungan sebelum bekerja	Kementerian Ketenagakerjaan

SK No 001505 C

Pasal 75 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		Pasal 75 ayat (3), dan Pasal 76 ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	2. Tata cara pemberian perlindungan selama bekerja 3. Tata cara pemberian perlindungan setelah bekerja 4. Perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia 5. Layanan terpadu satu atap 6. Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7. Tugas dan tanggung jawab perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia 8. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia	

11. RPP . . .

SK No 001506 C



- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	RPP tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan	Pasal 64 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Pelaksanaan penempatan dan pelindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan	Kementerian Ketenagakerjaan
12.	RPP tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan	Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan 2. Pelindungan selama bekerja dengan cara berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan	Kementerian Ketenagakerjaan
13.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	1. Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan

2. Pasal ...

SK No 001576 C



- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 41 ayat (3), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		
14.	RPP tentang Pedoman Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi	Pasal 48 ayat (1) huruf c, Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 55 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Kualifikasi unsur rupabumi yang dapat dilakukan penamaan 2. Prinsip-prinsip pemberian nama rupabumi 3. Tata cara pemberian dan perubahan nama rupabumi 4. Pelaksana pemberian dan perubahan nama rupabumi 5. Pembinaan dan pengawasan 6. Pembiayaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

15. RPP . . .

SK No 001508 C





- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
15.	RPP tentang Pengalihan Paten	Pasal 74 ayat (5) UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	Syarat dan tata cara pengalihan hak atas paten	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
16.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia	1. Pasal 33 dan Pasal 46 UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2. Pasal 64 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Peningkatan penerimaan santunan risiko kematian khusus karena gugur 2. Peningkatan santunan risiko kematian khusus karena tewas 3. Peningkatan pemberian beasiswa untuk anak peserta yang gugur, tewas, atau cacat tingkat III	Kementerian Pertahanan

17. RPP . . .

SK No 001509 C



- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	RPP tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	Penetapan Universitas Sebelas Maret sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
18.	RPP tentang Statuta Universitas Sebelas Maret	Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas Universitas Sebelas Maret</li> <li>2. Tridharma Perguruan Tinggi</li> <li>3. Sistem Pengelolaan Universitas Sebelas Maret</li> <li>4. Sistem penjaminan mutu internal</li> <li>5. Kode etik</li> <li>6. Bentuk dan tata cara penetapan peraturan</li> <li>7. Perencanaan</li> <li>8. Pendanaan dan kekayaan</li> </ol>	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

SK No 001510 C

19. RPP . . .



- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Perluasan lingkup kemudahan akses yang berupa bantuan langsung kepada masyarakat	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
20.	RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	Perubahan pengaturan mengenai ketentuan Dana Siap Pakai pada pengadaan barang dan/atau jasa	Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21. RPP ...

SK No 001577 C



- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	RPP tentang Pengelolaan Penghasilan Negara Bukan Pajak	Pasal 24, Pasal 40, Pasal 44, dan Pasal 46 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
22.	RPP tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 61, Pasal 62 ayat (7), dan Pasal 65 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Keberatan, keringanan, dan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
23.	RPP tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pengusulan jenis dan tarif 2. Penetapan jenis dan tarif	Kementerian Keuangan

SK No 001512 C

24. RPP . . .



- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
24.	RPP tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 57 UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	1. Pemeriksaan Wajib Bayar 2. Pemeriksaan Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak 3. Pemeriksaan Mitra Instansi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak	Kementerian Keuangan
25.	RPP tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Perubahan Pasal 3 huruf d PP Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi	Kementerian Keuangan

26. RPP . . .

SK No 001513 C





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
26.	RPP tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Bukopin Tbk	1. Pasal 4 ayat (4) UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN 2. Pasal 22 ayat (3) PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2016	Perubahan struktur kepemilikan saham negara (dilusi) melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada PT Bank Bukopin Tbk yang tidak diambil negara	Kementerian Keuangan
27.	RPP tentang Perusahaan Berbentuk Usaha Bersama	Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	1. Tata kelola usaha perasuransian berbentuk usaha bersama 2. Perubahan bentuk Badan Hukum 3. Pembubaran	Kementerian Keuangan

28. RPP ...

SK No 001514 C



- 15 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya	Pasal 16B UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009	1. Bentuk fasilitas 2. Penerima fasilitas 3. Persyaratan penerima fasilitas	Kementerian Keuangan
29.	RPP tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Pasal 8 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1. Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah kendaraan bermotor 2. Dasar pengenaan pajak 3. Saat terutang 4. Pengecualian objek kendaraan bermotor	Kementerian Keuangan

SK No 001515 C

30. RPerpres . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
30.	RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	Pasal 16B ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	1. Objek yang diberikan fasilitas 2. Perlakuan Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak strategis	Kementerian Keuangan

31. RPP . . .

SK No 001516 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
31.	RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada instansi</li><li>2. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam pada kementerian/lembaga</li><li>3. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan pada kementerian/lembaga</li><li>4. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pengelolaan Barang Milik Negara pada kementerian/lembaga</li></ol>	Kementerian Keuangan
32.	RPP tentang Penyertaan Modal Negara	Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3), serta Lampiran I Nomor 2.1 dan Nomor 2.2 UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan penambahan penyertaan modal negara</li><li>2. Besaran nilai penambahan penyertaan modal negara</li></ol>	Kementerian Keuangan

33. RPP . . .

SK No 001586 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
33.	RPP tentang Penyelenggaraan Pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	1. Penyelenggaraan kegiatan penguasaan di Pelabuhan Batam 2. Rencana induk pelabuhan 3. Penyelenggaraan pelabuhan pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 4. Kerja sama atau bentuk lainnya 5. Tarif 6. Pertukaran data	Kementerian Perhubungan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,  
  
Lydia Silvanna Djaman

SK No 001581 C

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

JOKO WIDODO





**RPP DALAM PROGSUN PP TAHUN 2018 YANG  
DILANJUTKAN PENYUSUNANNYA PADA TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
1.	RPP tentang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	Pasal 10, Pasal 18, Pasal 25, Pasal 42 ayat (6), Pasal 45, Pasal 51, Pasal 65 ayat (5), Pasal 67 ayat (2), Pasal 82, Pasal 85 ayat (4), Pasal 88 ayat (7), dan Pasal 102  UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usaha jasa konstruksi.</li> <li>2. Penyelenggaraan jasa konstruksi.</li> <li>3. Rantai pasok sumber daya konstruksi.</li> <li>4. Pembinaan jasa konstruksi.</li> <li>5. Partisipasi masyarakat.</li> <li>6. Sistem informasi jasa konstruksi.</li> <li>7. Tata cara pengenaan sanksi.</li> </ol>	Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat
2.	RPP tentang Perubahan atas PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	Pasal 116  UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Perubahan pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.</li> <li>2. Pencantuman informasi dalam kemasan produk tembakau.</li> <li>3. Larangan.</li> </ol>	Kementerian Kesehatan
3.	RPP tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 82 ayat (5) UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>2. Pasal 58 ayat (3) UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelompokan tenaga kesehatan dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>2. Tata cara pengenaan sanksi administratif.</li> <li>3. Pembelaan dan klarifikasi.</li> </ol>	Kementerian Kesehatan

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
4.	RPP tentang Perubahan Kedua atas PP No. 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Pasal 23, Pasal 33, Pasal 47, Pasal 65, Pasal 90, Pasal 103, dan Pasal 112  UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	Perubahan pengaturan mengenai pengadaan blanko Paspor dan mekanismenya.	Kementerian Hukum dan HAM
5.	RPP tentang Komisi Banding Merek	Pasal 32 dan Pasal 34 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	1. Tata cara permohonan pemeriksaan 2. Penyelesaian banding 3. Syarat dan tata cara pengangkatan anggota. 4. Susunan organisasi, tugas, dan fungsi.	Kementerian Hukum dan HAM
6.	RPP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas	Pasal 43 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di lembaga penyelenggara pendidikan. 2. Sanksi administratif.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7.	RPP tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan	Pasal 15 ayat (7), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), dan Pasal 40.	1. Pembentukan sistem pendataan kebudayaan terpadu. 2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. 3. Insentif penghargaan dan fasilitasi.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan		
8.	RPP tentang Pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34, Pasal 35 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 66 ayat (2), Pasal 68 ayat (3).  UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	1. Hak dan kewajiban pelaku perbukuan. 2. Akses, pembinaan, pengawasan dan insentif fiskal. 3. Standar, kaidah, dan kode etik penyaduran, pengilustrasian, dan penyesainan buku. 4. Penyediaan dan pendistribusian buku. 5. Peran serta masyarakat. 6. Tata cara pengenaan sanksi administrasi.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9.	RPP tentang Layanan Rehabilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas	Pasal 113  UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Fungsi dan bentuk pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi. 2. Mekanisme layanan rehabilitasi dan rehabilitasi. 3. Pendataan penyandang disabilitas. 4. Koordinasi. 5. Monitoring dan evaluasi.	Kementerian Sosial
10.	RPP tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Tinggi oleh Kementerian atau lembaga Nonkementerian	Pasal 94  UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	1. Tanggungjawab, tugas, dan wewenang. 2. Pendirian, pembukaan program, dan program studi pada PTKL 3. Pemberian gelar dan ijazah oleh PTKL.	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

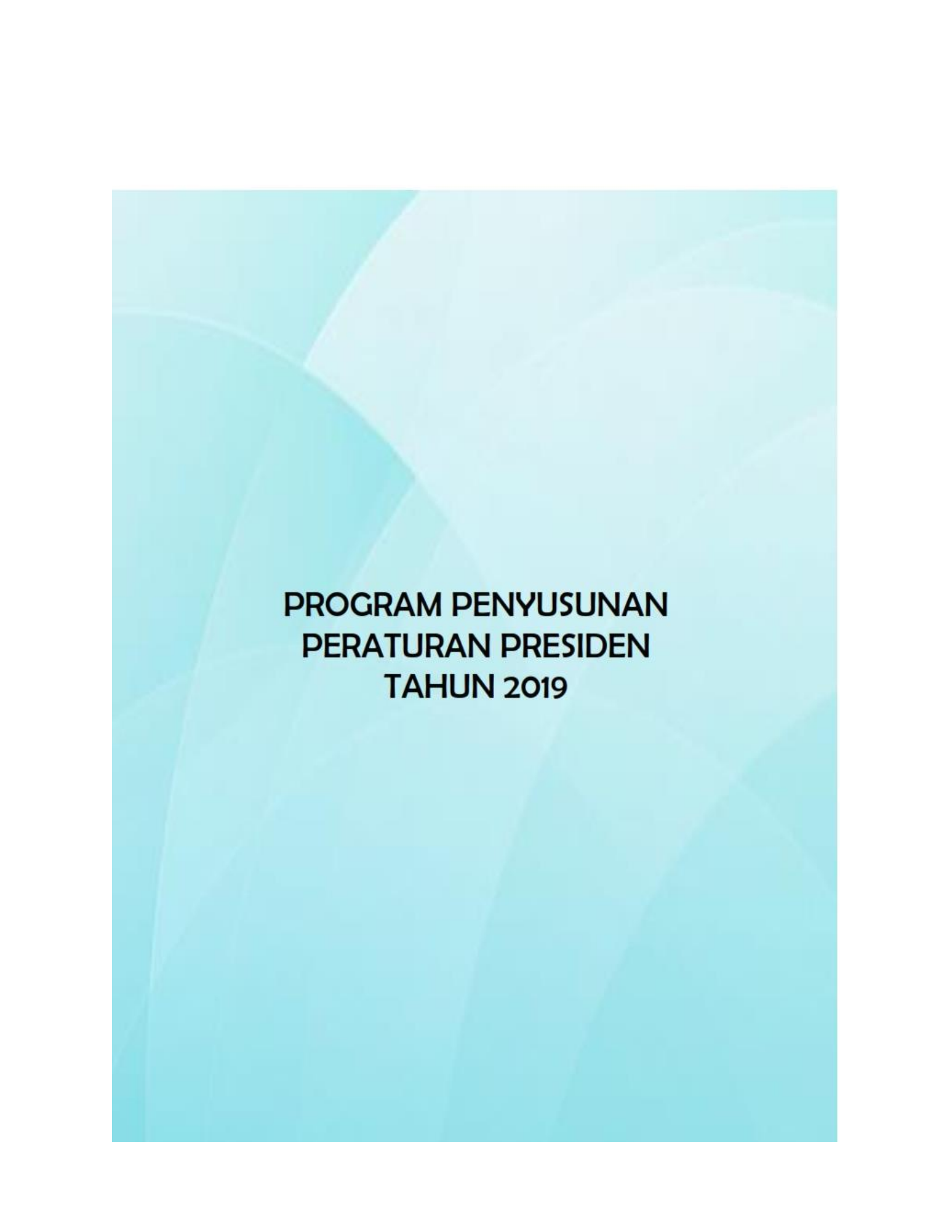
<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
11.	RPP tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion	Pasal 17 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	1. Pengelompokan pemanfaatan sumber radiasi pengion. 2. Perizinan 3. Kewajiban pemegang izin. 4. Klirens. 5. Inspeksi. 6. Sanksi administratif.	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
12.	RPP tentang Konservasi Energi	Pasal 25 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi	1. Penyelenggaraan dan pengelolaan Konservasi Energi. 2. Kemudahan, Insentif dan Disinsentif. 3. Sanksi Administratif.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
13.	RPP Perubahan atas PP No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	Pasal 16 ayat (4), Pasal 26, dan Pasal 48 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum menjadi pelaksana usaha jasa penunjang tenaga listrik. 2. klasifikasi, kualifikasi, serta sertifikasi, akreditasi dan izin atas instansi pemerintah dan badan usaha dengan status tidak berbadan hukum.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14.	RPP tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung	Pasal 15, Pasal 50 ayat (3), dan Pasal 64 UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi	1. Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. 2. Izin Pemanfaatan Langsung. 3. Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung. 4. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
15.	RPP tentang Perubahan Atas PP No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Perubahan judul menjadi: RPP tentang Penyusunan RKA K/L	Pasal 14 ayat (6) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara	Tata Cara penyusunan RKA K/L.	Kementerian Keuangan
16.	RPP tentang Dana Reboisasi	Pasal 16 PP No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu	Penyesuaian penggunaan PNPB Dana Reboisasi sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Kementerian Keuangan
17.	RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa Kantong Plastik	1. Pasal 4 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai 2. Pasal 4 ayat (6) UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018	1. Obyek, subyek, dan saat terutang cukai. 2. Perizinan. 3. Tarif cukai. 4. Fasilitas cukai. 5. Insentif cukai. 6. Tahapan pengenaan cukai.	Kementerian Keuangan

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
18.	RPP tentang Pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah/Daerah Tertentu Perubahan judul menjadi: RPP tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah/Daerah Tertentu	Pasal 31A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan	Perubahan pengaturan mengenai: 1. Wajib Pajak (WP) yang diberikan fasilitas. 2. Kriteria dan persyaratan pemberian. 3. Bentuk fasilitas perpajakan. 4. Mekanisme pengajuan permohonan fasilitas	Kementerian Keuangan
19.	RPP tentang Pembiayaan Usaha Tani	Pasal 87, Pasal 91 UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	1. Jenis kegiatan usaha tani. 2. Penyelenggaraan pembiayaan. 3. Sumber dan bentuk pembiayaan. 4. Pembinaan dan pengawasan. 5. Ketentuan sanksi.	Kementerian Pertanian
20.	RPP tentang Tindakan Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Pasal 99, Pasal 100 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Mekanisme, prosedur, dan tata cara pemberian tindakan pengamanan industri. 2. Mekanisme, prosedur, dan tata cara pemberian tindakan penyelamatan industri.	Kementerian Perindustrian
21.	RPP tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah	Pasal 13 UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	1. Penetapan dan penegasan batas negara. 2. Pertahanan dan Keamanan. 3. Penegakan hukum.	Kementerian Dalam Negeri



<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
	Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan		4. Kelembagaan. 5. Pengelolaan kawasan perbatasan.	
22.	RPP tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 56  UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .	1. Inventarisasi sumber air dan sumber pencemar. 2. Pemantauan kualitas air.Kriteria mutu air. 3. Integrasi Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) dengan Izin Lingkungan. 4. Istrumen Ekonomi untuk Pengendalian Pencemaran Air. 5. Penguatan peran serta masyarakat.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**PROGRAM PENYUSUNAN  
PERATURAN PRESIDEN  
TAHUN 2019**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2019  
TENTANG  
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019.

SK No 002518 A

KESATU . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2019.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Ma Silvanna Djaman

SK No 002524 A



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2019

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	RPerpres tentang Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan	Pasal 22 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	1. Penetapan jabatan atase pada negara tertentu 2. Kriteria jabatan Atase Ketenagakerjaan 3. Penugasan dan kewenangan jabatan Atase Ketenagakerjaan	Kementerian Ketenagakerjaan
2.	RPerpres tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2020 -2024	1. UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 2. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	1. Kepesertaan 2. Paket manfaat dan iuran 3. Pelayanan kesehatan 4. Keuangan 5. Kelembagaan dan organisasi 6. Strategi percepatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SK No 001584 C

3. RPerpres . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
3.	RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020 - 2024	Pasal 13 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	1. Kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara bagi pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan 2. Dasar dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan Sistem Pertahanan Negara	Kementerian Pertahanan
4.	RPerpres tentang Organisasi Perundingan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	Pembentukan tim perundingan batas wilayah negara dan kawasan	Kementerian Dalam Negeri

SK No 001579 C

5. RPerpres ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
5.	RPerpres tentang Susunan Organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	Pasal 43H UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang	1. Kedudukan, tugas, dan fungsi 2. Organisasi 3. Tata kerja	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
6.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Beijing Treaty on Audiovisual Performance</i> (Traktat Beijing tentang Pertunjukan Audiovisual)	Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pengesahan ratifikasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

SK No 001521 C

7. RPerpres . . .





NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
7.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for persons Who Are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled</i> (Traktat Marrakes untuk fasilitas akses atas ciptaan yang dipublikasikan bagi disabilitas netra, gangguan penglihatan atau disabilitas dalam membaca karya cetak)	Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Pengesahan ratifikasi	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8.	RPerpres tentang Susunan Kelembagaan dan Tugas Fungsi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia	Nondelegasi	Tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Nasional ASEAN	Kementerian Luar Negeri

SK No 001582 C

9. RPerpres . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
9.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Charter of the Developing-8 Organization for Economic Cooperation</i> (Piagam <i>Developing-8</i> Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi)	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia baik dalam kerangka D-8 maupun secara bilateral dengan negara anggota D-8</li><li>2. Penguatan kerja sama multilateral dalam 5 (lima) bidang sektor yang menjadi lini D-8 yaitu perdagangan, industri dan usaha kecil dan menengah, pertanian dan ketahanan pangan, perhubungan, serta energi dan mineral</li><li>3. Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia</li><li>4. Penguatan hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan asas timbal balik dengan negara anggota dan mitra kerja organisasi D-8</li></ol>	Kementerian Luar Negeri

10. RPerpres . . .

SK No 001523 C



NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
10.	RPerpres tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Keluarga dan Sistem Informasi Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan kependudukan dan/atau penyediaan parameter</li> <li>2. Analisis dampak kependudukan</li> <li>3. Kerja sama pendidikan kependudukan</li> <li>4. Penanganan isu-isu kependudukan</li> <li>5. Penyelenggaraan Keluarga Berencana</li> <li>6. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga</li> </ol>	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
11.	RPerpres tentang Zonasi Pendidikan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Zonasi Pendidikan</li> <li>2. Tanggung jawab penetapan Zonasi Pendidikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri-Menteri</li> <li>3. Pembinaan dan pengawasan atas kepatuhan dalam melaksanakan penetapan Zonasi Pendidikan untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan</li> </ol>	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12. RPerpres ...

SK No 001524 C



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
12.	RPerpres tentang Pengendalian Formasi, Pemindahan, serta Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	1. Pengendalian formasi Pendidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2. Pemindahan Pendidik PNS antar Provinsi 3. Pengembangan karir Pendidik PNS 4. Persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan pembiayaan Pengganti pengajar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
13.	RPerpres tentang Strategi Kebudayaan	Pasal 13 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	1. Materi muatan strategi kebudayaan. 2. Kelengkapan strategi kebudayaan. 3. Jangka waktu penyusunan strategi kebudayaan	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
14.	RPerpres tentang Dokter Layanan Primer	Nondelegasi	1. Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan termasuk penempatan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama	Kementerian Kesehatan

SK No 001574 C

2. Pendanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Pendanaan bagi dokter layanan primer melalui pemberian insentif 3. Pembinaan dan pengawasan termasuk kesinambungan penyelenggaraan dokter layanan primer di fasilitas pelayanan kesehatan pertama	
15.	RPerpres tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis	Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan	1. Mekanisme pendayagunaan dokter spesialis 2. Peserta dan lokasi penempatan dalam pendayagunaan dokter spesialis 3. Jangka waktu pendayagunaan dokter spesialis 4. Hak dan kewajiban peserta pendayagunaan dokter spesialis	Kementerian Kesehatan
16.	RPerpres tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 - 2024	1. Pasal 12 ayat (5) UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Sasaran pembangunan industri tahun 2020 - 2024 2. Fokus pengembangan industri tahun 2020 - 2024 serta tahapan capaian pengembangan industri	Kementerian Perindustrian

SK No 001526 C

2. Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
		2. Pasal 3 PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015 – 2035	3. Program pengembangan industri	
17.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak dan Fungsional Asisten Penilai Pajak	Nondelegasi	Pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penilai Pajak atau Asisten Penilai Pajak diberikan tunjangan penilai pajak setiap bulan	Kementerian Keuangan
18.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Analis Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan
19.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara	Kementerian Keuangan

SK No 001527 C

20. RPerpres . . .



NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
20.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Analis Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan
21.	RPerpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Nondelegasi	Skema insentif kepada pejabat fungsional Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Kementerian Keuangan
22.	RPerpres tentang Pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	1. UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 2. UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020	1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus fisik	Kementerian Keuangan

23. RPerpres . . .

SK No 001528 C





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
23.	RPerpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 58 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	1. Penambahan keanggotaan dan/atau unsur keanggotaan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang 2. Penganggaran gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
24.	RPerpres tentang Kawasan Candi Prambanan	Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	1. Penetapan kawasan strategis nasional 2. Perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional 3. Pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional 4. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
25.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Peran dan fungsi 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi 3. Rencana struktur ruang laut	Kementerian Kelautan dan Perikanan

SK No 001529 C

4. Rencana . . .



NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Rencana pola ruang laut 5. Rencana pemanfaatan ruang laut 6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut 7. Pengawasan 8. Peran serta masyarakat	
26.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Taman Komodo	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Peran dan fungsi 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi 3. Rencana struktur ruang laut 4. Rencana pola ruang laut 5. Rencana pemanfaatan ruang laut 6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut 7. Pengawasan 8. Peran serta masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan
27.	RPerpres tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Denpasar - Badung - Gianyar - Tabanan (Sarbagita)	Pasal 43 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Peran dan fungsi 2. Tujuan, kebijakan, dan strategi 3. Rencana struktur ruang laut 4. Rencana pola ruang laut 5. Rencana pemanfaatan ruang laut 6. Pengendalian pemanfaatan ruang laut 7. Pengawasan 8. Peran serta masyarakat	Kementerian Kelautan dan Perikanan

SK No 001530 C

28. RPerpres . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
28.	RPerpres tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dasar regulasi untuk pemberlakuan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. strategi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i></li><li>b. pedoman pelaksanaan intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di kabupaten/kota</li><li>c. pedoman penandaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja percepatan penurunan <i>stunting</i></li></ol></li><li>2. Peran pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta mekanisme monitoring dan evaluasi</li><li>3. Penyesuaian gugus tugas dan pengaturan peranan kementerian/lembaga dalam melaksanakan percepatan perbaikan gizi secara terintegrasi</li></ol>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SK No 001531 C

4. Pengaturan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 14 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			4. Pengaturan <i>sharing</i> data/informasi kementerian/lembaga di pusat dan daerah untuk penguatan monitoring dan evaluasi percepatan perbaikan gizi 5. Pengaturan mengenai kabupaten/kota prioritas pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman

SK No 001575 C



**RPERPRES DALAM PROGSUN PERPRES TAHUN 2018 YANG  
DILANJUTKAN PENYUSUNANNYA PADA TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
1.	RPerpres tentang Kebijakan Pengelolaan, Kegiatan Produksi, dan Penjaminan Industri Pertahanan	Pasal 24 ayat (2), Pasal 38 ayat (5) , dan Pasal 62 ayat (3)  UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. 2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan Industri Pertahanan. 3. Penentuan teknologi dan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang akan dikuasai dan dikembangkan. 4. Standardisasi serta kelaikan produk dan/atau Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.	Kementerian Pertahanan
2.	RPerpres tentang Perubahan Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Pasal 64 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	1. Perubahan Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik. 2. Perubahan Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.	Kementerian Hukum dan HAM
3.	Rperpres tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak	Pasal 141 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	1. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada orang perseorangan yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.	Kementerian Sosial

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Penyandang Disabilitas		<p>2. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan kepada badan hukum dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.</p> <p>3. Syarat dan tata cara pemberian penghargaan penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.</p>	
4.	RPerpres tentang Pembentukan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	<p>Pasal 48</p> <p>UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia</p>	<p>1. Pembentukan.</p> <p>2. Fungsi.</p> <p>3. Struktur Organisasi, dan</p> <p>4. Tata Kerja Badan Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	Kementerian Ketenagakerjaan
5.	RPerpres tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender. Judul diubah menjadi: RPerpres tentang Strategi Nasional	Nondelegasi	Pedoman umum percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe nas

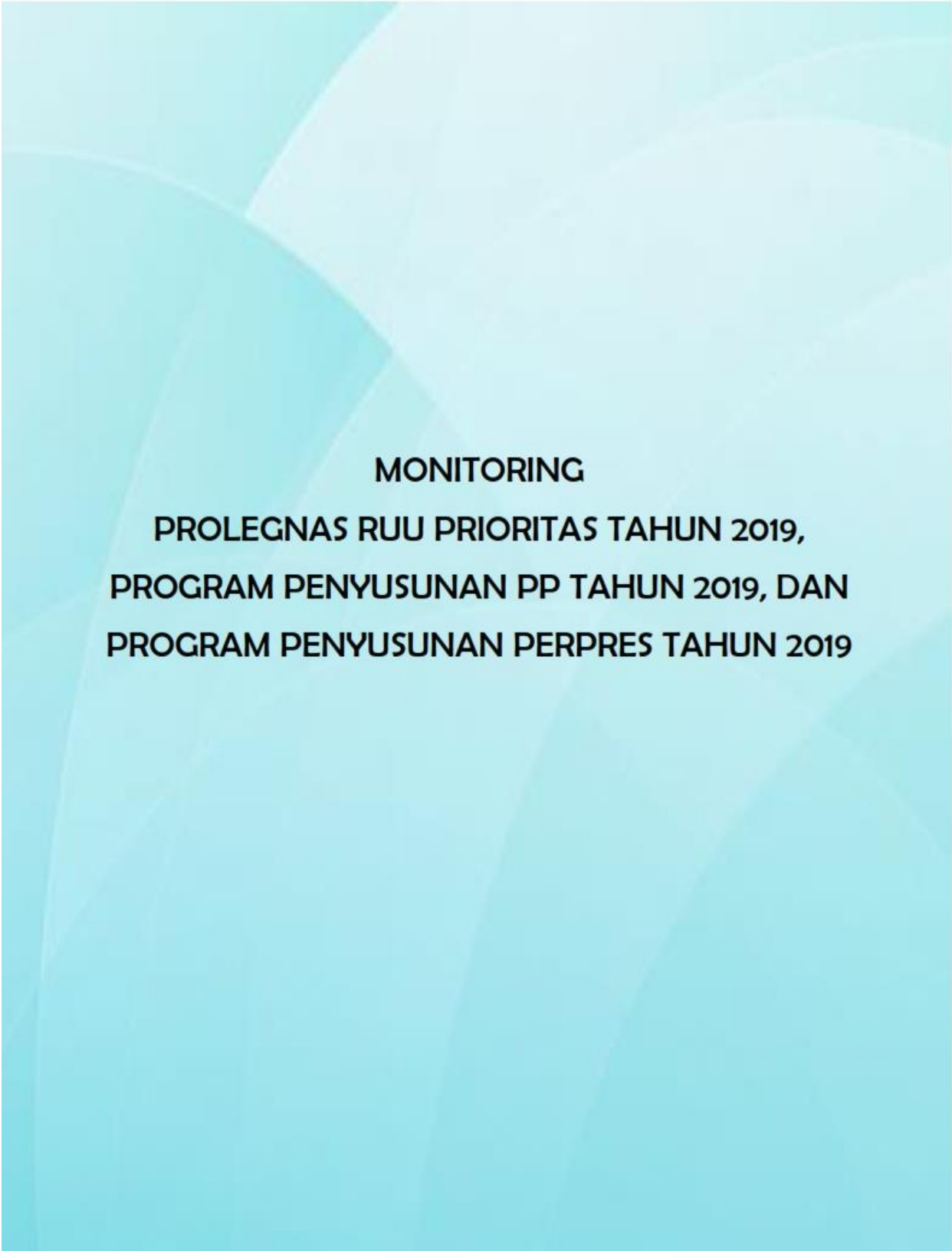


NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	POKOK MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
	Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam rangka Percepatan Pengarusutamaan Gender.			
6.	RPerpres tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan Judul diubah menjadi: RPerpres tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar semua pihak dalam pengelolaan danau.</li> <li>2. Pengelolaan danau yang terintegrasi.</li> <li>3. Pembagian peran yang jelas lintas K/L dan Pemda.</li> </ol>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappe nas
7.	RPerpres tentang Penerimaan Pinjaman Komersial Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Daerah Judul diubah menjadi: RPerpres tentang Utang Luar Negeri Terkait Pemerintah	Menjalankan Pasal 23 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percepatan proses permohonan persetujuan.</li> <li>2. Persyaratan permohonan persetujuan Pinjaman Komersial Luar Negeri.</li> <li>3. Sanksi.</li> </ol>	Kementerian Keuangan

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
8.	RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tajikistan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</li> <li>2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan persetujuan.</li> <li>2. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit (perusahaan, BUT, Pelayaran dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain.</li> <li>3. Kerja sama bantuan perpajakan.</li> <li>4. Pertukaran informasi.</li> </ol>	Kementerian Keuangan
9.	RPerpres tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pajak atas Penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan</li> <li>2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan persetujuan.</li> <li>2. Klausul substantif (penentuan penduduk, pembagian hak pemajakan atas profit (perusahaan, BUT, Pelayaran dan perkapalan) dividen, bunga, royalti, dan penghasilan lain.</li> <li>3. Kerja sama bantuan perpajakan.</li> <li>4. Pertukaran informasi.</li> </ol>	Kementerian Keuangan

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
10.	RPerpres tentang Pengesahan <i>Multilateral Convention to implement Tax Treaty Related Measures to prevent Base Erosion and Profit Shifting</i> (Konvensi multilateral untuk menerapkan Tindakan-Tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba)	1. Pasal 32A UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 2. Pasal 11 ayat (1), Pasal 9 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	1. Pengesahan. 2. Pemberlakuan.	Kementerian Keuangan
11.	RPerpres tentang Industri yang Memiliki Keunikan dan Merupakan Warisan Budaya Bangsa dan Industri Menengah Tertentu yang Dicadangkan untuk Dimiliki oleh Warga Negara	Pasal 103 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	1. Jenis industri yang dikategorikan sebagai industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya. 2. Jenis industri menengah tertentu yang dicadangkan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.	Kementerian Perindustrian
12.	RPerpres tentang Pengakuan Hukum	Pasal 95	1. Penegakan hukum administrasi.	Kementerian Lingkungan

<b>NO.</b>	<b>JUDUL</b>	<b>DASAR PEMBENTUKAN</b>	<b>POKOK MATERI MUATAN</b>	<b>PEMRAKARSA</b>
	Pidana Lingkungan Hidup Terpadu dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 3. Penegakan hukum pidana.	Hidup dan Kehutanan
13.	RPerpres tentang Usaha Penyediaan Bangunan	Pasal 36 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	1. Perizinan usaha penyediaan bangunan 2. Pengembangan usaha penyediaan bangunan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
14.	RPerpres tentang Koordinasi dan Perencanaan dan Penganggaran Pengelolaan Bagi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Menjalankan Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1. Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran. 2. Koordinasi penyusunan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur Kawasan Perbatasan sesuai dengan skala prioritas.	Kementerian Dalam Negeri
15.	RPerpres tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024	Menjalankan Pasal 5 ayat (3) Perpres No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1. Desain besar pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. 2. Perencanaan jangka panjang Pengelolaan Perbatasan Negara. 3. Pengelolaan.	Kementerian Dalam Negeri



**MONITORING**  
**PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2019,**  
**PROGRAM PENYUSUNAN PP TAHUN 2019, DAN**  
**PROGRAM PENYUSUNAN PERPRES TAHUN 2019**

**Pemantauan Penyusunan RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019  
Serta RPP dan RPerpres dalam Program Penyusunan PP dan  
Program Penyusunan Perpres Tahun 2019**

- ❖ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pemantauan penyusunan RUU, RPP, dan RPerpres melalui sistem jaringan (daring) dengan laman <https://serambi.ksp.go.id/>.
- ❖ Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) melakukan pelaporan penyusunan RUU, RPP, dan RPerpres dimaksud melalui laman <https://serambi.ksp.go.id/> sesuai dengan target penyusunan yang telah ditetapkan, pelaporan dilakukan secara periodik pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09), dan Desember (B12).\*
- ❖ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi terhadap laporan berdasarkan data dukung yang telah disampaikan oleh Kementerian/LPNK ke dalam sistem monitoring.

Catatan (\*):

Untuk pemantauan Prolegnas Prioritas, Program Penyusunan PP, dan Program Penyusunan Perpres Tahun 2019, masa pelaporan pada bulan maret (B03) dilakukan secara bersamaan dengan pelaporan bulan Juni (B06).

**Target Penyusunan RUU Tahun 2019**



UKURAN KEBERHASILAN B06, B09, B12	DATA DUKUNG YANG HARUS DI UPLOAD DALAM SISTEM MONITORING
<b>B06:</b> 1. Tersampainya RUU ke DPR untuk pembahasan; 2. Proses pembahasan RUU di DPR.	1. Scan draft RUU yang telah diparaf kementerian terkait; 2. Scan Surat Presiden penyampaian RUU ke DPR; 3. laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR
<b>B09:</b> Proses pembahasan RUU di DPR.	Laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR
<b>B12:</b> Terselesaikannya pembahasan RUU di DPR.	Laporan perkembangan pembahasan RUU di DPR



### Target Penyusunan RPP/RPerpres Usulan Baru Tahun 2019



UKURAN KEBERHASILAN B06, B09, B12	DATA DUKUNG YANG HARUS DI UPLOAD DALAM SISTEM MONITORING
<b>B06:</b> 1. Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian (SK-PAK); 2. Terselesaikannya Proses PAK Rancangan PP/Perpres.	1. Scan SK-PAK ; 2. Rancangan PP/Perpres; 3. Scan surat permohonan harmonisasi yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM.
<b>B09:</b> Terselesaikannya proses harmonisasi Rancangan PP/Perpres.	1. Rancangan PP/Perpres; 2. Laporan perkembangan proses harmonisasi Rancangan PP/Perpres di Kemenkumham; 3. Scan undangan rapat harmonisasi; 4. Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham.
<b>B12:</b> Tersampainya Rancangan PP/Perpres kepada Presiden.	Scan surat penyampaian Rancangan PP/Perpres kepada Presiden

### Target Penyusunan RPP/RPerpres Luncuran Tahun 2018



UKURAN KEBERHASILAN B06, B09, B12	DATA DUKUNG YANG HARUS DI UPLOAD DALAM SISTEM MONITORING
<b>B06:</b> Terselesaikannya proses harmonisasi Rancangan PP/Perpres.	1. Rancangan PP/Perpres; 2. Laporan perkembangan proses harmonisasi; 3. Scan undangan rapat harmonisasi; 4. Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham.
<b>B09 dan B12:</b> Tersampainya Rancangan PP/Perpres kepada Presiden.	Scan surat penyampaian Rancangan PP/Perpres kepada Presiden